



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 150/KPN.W15.U2/SK/XI/2024**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGADAAN JASA POS BANTUAN HUKUM
(POSBAKUM) TAHUN ANGGARAN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang tidak mampu berhak untuk memperoleh layanan hukum yang pembiayaannya ditanggung oleh negara, sehingga pengadilan harus memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh layanan hukum yang mana mekanismenya harus ditentukan secara tertib dan transparan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Mahkamah Agung RI Tanggal 9 Januari 2014 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tanggal 11 Oktober 2024 Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, maka perlu dibentuk Tim Teknis Pengadaan Jasa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kandangan;



- c. Bahwa Tim Teknis yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditunjuk berdasarkan rekomendasi Panitera Pengadilan Negeri Kandangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
 7. Surat Kepala Biro Umum Selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 3/Bua.ULP/2/2018 Hal Langkah-langkah Pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tanggal 11 Oktober 2024 Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 tentang Petunjuk Teknis



Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGADAAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) TAHUN ANGGARAN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Negeri Kandangan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Teknis Pengadaan Posbakum bertugas membantu PPK untuk menyusun KAK (Kerangka Acuan Keqa) Pengadaan Jasa Posbakum;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan hasil seleksi diumumkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan susunan akibat promosi dan mutasi dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 29 November 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 150/KPN.W15.U2/SK/XI/2024

Tanggal : 29 November 2024

Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun Anggaran 2025 Pada Pengadilan Negeri Kandangan

TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGADAAN POS BANTUAN HUKUM
(POSBAKUM) TAHUN ANGGARAN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KET
1.	Martua Sahat Togatorop, S.H	Panitera Muda Hukum	
2.	Surya Harry Prayoga, SH, MH	Panitera Muda Perdata	
3.	Dorkas B Sitompul, A.Md	Pengelola Penanganan Perkara/Staff di Kepaniteraan Pidana	Posisi Panmud Pidana tidak ada saat ini

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 29 November 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

